

DILEMATIKA PEMERTAHANAN DAN PEMBERDAYAAN BAHASA DAERAH DI ANTARA BAHASA INDONESIA DAN BAHASA ASING

Mara Untung Ritonga
Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Medan

ABSTRACT

Bahasa Indonesia can posit itself to be scientific and modern language does not happen as the way it is. Ethnic languages plus foreign languages have significant roles in developing bahasa Indonesia as the people use today. The efforts to preserve and enhance ethnic languages lie on constitution only as cultural heritage plus language officer policy and few seminars as a language strategy against three of four big powers; bahasa Indonesia, English, Mandarin, and Japanese language in which threat ethnic languages existency on the earth-even ironically close to the extinct languages.

It is admitted that there is a very deep gap among them particularly as a meant of scientific and information languages on mass media. It is, if we still have the same perception that ethnic languages are very important to transmit culture and tradition to young generation is not sufficient, the previous ways and policy need to be changed to the virtu one, more effective and functional ways, that is, boost them to be as language used on mass media. That need to ask; do ethnic languages have capability with their very simple and unlimited vocabularies? For we know that there isn't any effort to add or create new words in ethnic languages. Thus, the paper aims to investigate the precise ways to empower ethnic languages through Indonesian television channels as an effort to enlighten the natives of ethnic languages and respect their cultural dignity.

Kata Kunci : pemertahanan, pemberdayaan, dan bahasa

PENDAHULUAN

Mendorong penggunaan bahasa Daerah di mass media; televisi, surat khabar, dan majalah misalnya, hampir tidak pernah terpikirkan dan direncanakan sebagai suatu kebijakan politik oleh Pusat Bahasa, Balai Bahasa, Fakultas Sastra, linguist dan sebagainya. Nuansa budaya daerah di beberapa siaran berita, sinetron, dan film sebagai latar cerita sangat menarik, sayangnya tidak didukung oleh penggunaan bahasa Daerah secara total. Artinya, penggunaan bahasa Daerah hanya sebagai serpihan pemanis atau sebagai alat koherensi yang digunakan sutradara berdasarkan latar cerita yang diusung. Hal ini dapat dipahami karena media tersebut dikonsumsi oleh publik di seluruh Indonesia. Namun, apakah tidak mungkin penggunaan bahasa Daerah secara total dilakukan sebagai penghargaan budaya dan bahasa yang dimiliki oleh suatu masyarakat?

Pengakomodasian secara menyeluruh bahasa daerah yang ada di Indonesia melalui media di atas memang sangat kompleks dan tidak mungkin. Namun, ada budaya daerah dan bahasa daerah yang dominan dari setiap propinsi di Indonesia yang dapat mewakili budaya dan bahasa minoritas. Jika saluran ini dilakukan, akan memberikan kontribusi yang sangat signifikan, yakni, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program pemerintah dan swasta, dapat mencerdaskan masyarakat yang monolingual (penutur bahasa daerah) dan masyarakat bilingual yang lebih memahami atau menggunakan bahasa daerah lebih mudah dan fasih.

Ketidakadilan pemerintah, professional atau pun kalangan swasta adalah penggunaan bahasa Mandarin/Tionghowa dan bahasa Inggris saja yang boleh digunakan dalam penyiaran berita karena dianggap kedua bahasa tersebut memiliki segi komersial/ daya jual dibanding bahasa daerah lainnya di Indonesia. Padahal, masyarakat yang menggunakan kedua bahasa itu jumlahnya sedikit (minoritas) dibanding pengguna BI dan BD di Indonesia. Seandainya bahasa daerah lainnya juga memiliki media transmisi seperti bahasa Mandarin (suku minoritas) di Indonesia, mungkin masyarakat Indonesia di daerah pedesaan dapat tercerdaskan. Jumlah penutur bahasa-bahasa daerah lain jauh lebih banyak dibanding jumlah penutur bahasa Cina/Mandarin/Tionghowa di Indonesia. Inilah sebagai dilematika yang sangat tidak adil dalam konteks pemertahanan dan pemberdayaan bahasa daerah. Sikap bahasa masyarakat untuk bahasa daerah dan bahasa Indonesia lebih rendah atau tidak baik dibanding bahasa Inggris. Persoalan ini dapat ditelusuri jawaban dan deskripsi sosiokultural dan sosiopolitik-linguistik pada bagian berikut.

Krisis moneter memukul tajam perekonomian Indonesia dan membawa bangsa ini ke krisis multidimensi. Rakyat menderita, out put SDM pun anjlok. Masalah Negara Indonesia merupakan benang kusut, memutus benang dan merajut benang baru berarti mengizinkan terjadinya disintegrasi bangsa. Wacana yang demikian tidak mungkin dan tidak harus terjadi demi keutuhan NKRI, artinya, faktor politik dan nasionalisme harus dikedepankan, bukan kesejahteraan rakyat melalui pendidikan dan penciptaan lapangan pekerjaan.

Krisis multidimensi di atas juga dialami oleh bahasa Indonesia, bahasa daerah dan budaya daerah/nusantara yang terdesak oleh arus modernisasi dan globalisasi (bahasa dan budaya asing). Krisis bahasa dan budaya ini tampak jelas dalam kehidupan masyarakat dan pola hidup para elite di Republik ini. Dalam perspektif sosio-politik linguistik, repertoar dan perubahan gejala kebahasaan masyarakat Indonesia, dari ekabahasaan yang berbahasa ibu bahasa daerah menjadi dwibahasawan dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua dan bahasa Inggris/asing dan bahasa daerah sebagai bahasa kedua atau ketiga bagi sebagian masyarakat Indonesia merupakan masalah yang sangat menarik untuk dikaji dan dipersoalkan secara terus-menerus. Gejala tersebut akan selalu merangsang untuk dikaji karena bagi bangsa Indonesia, semboyan *bhineka tunggal ika* tetap dipertahankan, keanekaragaman bahasa daerah, budaya daerah, dan bahasa asing dan budayanya tetap diberi ruang dan hak hidup berdampingan dengan bahasa nasional dan budaya nusantara.

Berdasarkan pengamatan di lapangan ketika berkunjung ke beberapa kota dan daerah di Indonesia, menunjukkan bahwa sebagian besar anak Indonesia yang

berada di perkotaan, juga yang berasal dari keluarga dwisuku, dan berpendidikan relatif tinggi, sudah menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa ibu dan bahasa asing sebagai bahasa kedua. Di sisi lain, meskipun sebagian besar anak atau generasi muda di pedesaan memang masih berbahasa ibu bahasa daerah, gejala menurunnya mutu penguasaan dan penggunaan bahasa daerah, khususnya pada acara/kegiatan yang berhubungan dengan adaptasi istiadat, dan lainnya, rendahnya apresiasi generasi muda terhadap sastra dan budaya daerah, menjadi keprihatinan generasi tua. Jika ditanyakan mengapa demikian, jawabannya umumnya, kuno, tidak maju, kesannya tertinggal bila dibandingkan orang yang pandai berbahasa asing. Menurut hasil survei yang dilakukan UNESCO (Lauder, 2001: 124 -126), ketidاكلancaran dan ketidاكلberhasilan transmisi (pewarisan) bahasa daerah antargenerasi penutur sangat memilukan, yakni, dari 90 bahasa minoritas yang disurvei di sejumlah Negara, hanya 36% terwaris secara mulus, 64 % tidak terwaris secara baik, 32 % berfungsi, 68 % bahasa minoritas tersebut tidak berfungsi sama sekali (punah). Deskripsi awal kehidupan bahasa –bahasa minoritas di sejumlah Negara itu, kendati perlu diteliti kembali, tidak terlalu berbeda jauh dengan kondisi terakhir bahasa-bahasa minoritas di Nusantara.

Perkembangan bahasa Indonesia yang bermula dari Melayu Riau sebagai *lingua franca* di pelbagai wilayah Nusantara, dan kemudian menjadi bahasa nasional dan bahasa Negara, bahkan semakin diminati oleh banyak bangsa, antara lain; Australia, Jepang, Korea, Jerman, dan Italia, diterima sebagai prestasi budaya bangsa Indonesia yang patut dibanggakan. Pada masa yang akan datang perkembangan bahasa Indonesia sebagai komponen kebudayaan Indonesia dan sebagai jembatan antarbangsa akan semakin pesat pula. Walaupun demikian, mutu pemakaian bahasa Indonesia dengan wilayah penyebarannya yang belum merata, patut diprihatinkan. Masih banyak warga bangsa Indonesia yang rendah mutu penguasaan dan pemakaiannya, bahkan banyak yang buta bahasa Indonesia, dan ada pula wilayah di Tanah Air ini yang belum menjadi daerah pemakai bahasa nasional itu. Buta huruf dan buta bahasa, selain rendahnya gizi anak Indonesia selama krisis multidimensi yang berkepanjangan ini, menjadi indikator rendahnya mutu SDM Indonesia. Keadaan yang demikian ini jelas mempengaruhi usaha pemerataan pembangunan karena pemahaman konsep pembangunan umumnya berkaitan dengan pemahaman makna dan konsep IPTEK yang diungkapkan dalam bahasa Indonesia (Moelono, 1981: 2).

Nasionalisme yang dibangun oleh pendiri bangsa ini sejak awal abad ke 20, khususnya semangat *Soepah Pemoeda*, 28 Oktober 1928, diharapkan masih tertanam kuat dalam setiap sanubari warga bangsa. Nasionalisme kewilayahan nusantara yang utuh diteguhkan di bawah sumpah “Satoe Tanah Air”, Tanah Air Indonesia”, kesatuan jiwa dan semangat sebagai bangsa yang majemuk dilandasi sumpah “*Satoe Bangsa, Bangsa Indonesia*”, dan roh budaya kebahasaan perekat kebersamaan didasari sumpah “*Mendjoendjung bahasa Persatuan, bahasa Indonesia*”. Trisumpah itu kita sadari sebagai tiang penyangga utama wilayah tanah dan air yang luas, pengikat bangsa yang majemuk, keanekaan bahasa dan budaya sebagai penciri jati diri bangsa Indonesia.

Secara budaya memang harus diakui bahwa bahasa Indonesialah yang telah merekatkan masyarakat Indonesia yang multietnik ini menjadi satu bangsa. Dari sisi

ini disadari bahwa bahasa Indonesia pula yang telah menunjukkan jati diri dan martabat bangsa kita sebagai bangsa yang mampu membangun kebudayaan Indonesia. Kenyataan bahwa melalui pendidikan nasional. Pengembangan IPTEK, termasuk seni, sastra, dan lainnya diwahanai oleh bahasa Indonesia itulah yang menunjukkan perkembangan bahasa Indonesia, kemajuan masyarakat dan kebudayaan Indonesia. Rintisan Balai Pustaka, Pujangga Baru, Angkatan 45, Angkatan 66, dan perjalanan bahasa Indonesia hingga kini, plus kehadiran sastra Indonesia. Politik Orde Baru yang sentralistik dan kebijakan penyeragaman dengan dalih demi persatuan dan kesatuan bangsa, memang cukup berhasil mengembangkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pembangunan dan bahasa modern.

Seiring dengan penyebaran bahasa dan kebudayaan Indonesia yang semakin intens dan meluas, juga kehadiran bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, membuat sebagian bahasa daerah terabaikan atau terlantar. Salah satu komponen budaya bangsa itu **kurang dihormati, kurang dihargai, dan kurang dipelihara** oleh Negara dan para ahli warisnya. Pada hal dalam butir 2 pasal 32 UUD pasal 32 1945, hasil amandemen, dirumuskan bahwa "*Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan kebudayaan nasional*". Dalam perspektif konstitusi dapat disimpulkan bahwa pengabaian dan pelanggaran atas UUD 1945 telah terjadi selama perjalanan republik ini. Negara dan masyarakat Indonesia yang mengaku pewaris nilai-nilai budaya bangsa telah menelantarkan warisan leluhur mereka.

Era otonomi daerah dan era desentralisasi pengelolaan Negara, khususnya di bidang kebudayaan ini memerlukan kepedulian baru terhadap nasib warisan itu jika bahasa-bahasa daerah itu mesih disepakati untuk tidak dibiarkan mengalami kerapuhan dan kepunahan. Ciri-ciri kerapuhan bahkan tanda-tanda kematian sejumlah bahasa local akan dicoba diperikan di bawah ini. Selanjutnya, ancaman pemberdayaan melalui pemekaran kembali fungsi sosiokulturalnya pada ranah adat – budaya dan ranah agama dianjurkan, di sisi ranah keluarga.

Sistem pendidikan sebagai instrument dan jalur formal penerusan bahasa daerah, masih memprihatinkan karena sebagaimana iklim pendidikan nasional kita yang masih terjebak formalisme. Rusyana (1999: 73-75) yang mengajukan fakta tentang nasib buruk bahasa-bahasa daerah besar, apalagi bahasa-bahasa kecil yang jumlahnya banyak tersebut, ternyata di 12 provinsi di Indonesia, hanya sejumlah kecil bahasa daerah yang diajarkan di SD dan SLTP. Diinformasikan bahwa hanya bahasa Aceh dan Gayo di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, bahasa Batak (Toba, Angkola, Mandailing, Simalungun, Karo) dan bahasa Melayu di provinsi Sumatera Utara, bahasa Rejang di provinsi Bengkulu, bahasa Lampung di provinsi Lampung, bahasa Sunda di provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, dialek Cirebon dan Indramayu di Jawa Barat, bahasa Jawa di provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan provinsi Jawa Timur, bahasa Madura di Jawa Timur, bahasa Dayak (Simpang dan Kanayan) di provinsi Kalimantan Barat, bahasa Banjar dan bahasa Kutei di provinsi Kalimantan Timur, bahasa Tombulu, Tonsawang, dan Mongondow di provinsi Sulawesi Utara, bahasa Bugis, Makasar, Mandar, dan Toraja di provinsi Sulawesi Selatan, bahasa Tolaki, Muna, dan Walio di provinsi Sulawesi Tenggara, serta bahasa Bali di provinsi Bali, diajarkan di sekolah-sekolah

dasar dan menengah. Sementara, bahasa-bahasa daerah kecil lainnya di wilayah-wilayah di atas tidak diajarkan. Secara nasional, ternyata jauh lebih banyak wilayah provinsi yang tidak menjadikan bahasa daerah sebagai bahan pengajaran (muatan lokal) di sekolah-sekolah. Bahasa daerah hanya sebagai *titipan* dalam penerapan kurikulum muatan lokal sebagai pewarna saja. Terlepas dari seberapa jauh keberhasilan pengajaran bahasa daerah tersebut, tanda kecilnya penghargaan dan pemeliharaan atas unsur budaya bangsa di provinsi-provinsi tersebut masih tampak. Sementara itu, masih banyak sekali bahasa daerah kecil lainnya di luar 12 provinsi di atas yang memang belum dilirik, baik oleh para ahli warisnya, oleh lembaga pendidikan formal, pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.

Sebelum melangkah cepat pada era global ini, penjejak kembali masa lalu untuk menelusuri sejarah budaya merupakan sebuah kearifan yang tetap penting. Adalah fakta sejarah bahwa sebelum bahasa Indonesia mulai “menggeser” dan “menyusutkan” fungsi-fungsi bahasa daerah, semua bahasa daerah di Indonesia ini telah menjalankan fungsi kemasyarakatan dan fungsi transmisi nilai-nilai budaya antargenerasi (baca Halliday, 1977:8). Khazanah nilai budaya lokal dan perangkat norma sosial guyub tuturnya diwanahai dan diwariskan dalam kemasan bahasa daerah. Kendatipun berskala lokal dan berdimensi primordial, “prestasi” kebahasaan generasi-generasi terdahulu yang membangun identitas komunitas etnik itu, masih patut diacu (band. Ahmad, 2002: 439 – 441). Seiring dengan arus perubahan global yang semakin menderas, transformasi sosiokultural dan perubahan tatanan kebahasaan Nusantara ditengarai pula dengan dominasi bahasa nasional dan bahasa asing, sementara di sisi lain bahasa daerah semakin terjepit. Bahasa Indonesia dengan fungsinya sebagai sarana komunikasi utama masyarakat kota, seperti juga budaya metropolitan dengan kedasyatan teknologi elektronik yang teknikal dan digital, telah membius generasi muda. Gejala konsumtif, materialistic, dan hedonistic yang mewarnai budaya masyarakat Indonesia, juga melanda ke generasi penerus yang semakin sepi dari tradisi, tercabut dan terputus dari akar masa lalu. Ini adalah kenyataan budaya bangsa di tengah era global, yang tampaknya semakin sulit disaring, dipilih, dipilah, dan diintegrasikan ke dalam wadah jati diri bangsa Indonesia.

KEPUNAHAN DAN KERAPUHAN BAHASA DAERAH

Sebagian besar bahasa daerah di Indonesia tergolong bahasa kecil karena hanya didukung oleh kurang dari satu juta penutur, makin lama makin menyusut jumlah pendukungnya, dan umumnya tidak memiliki tradisi tulis (lihat, Ferguson, 1971: 324-326). Sebagian besar bahasa daerah tidak mengenal tradisi tulis sehingga pewarisan, proses pembakuan, pengembangan, dan upaya pemberdayaannya tersendat-sendat yang berakar juga dari persoalan bahasa-bahasa daerah. Kenyataan ini berbeda dengan bahasa Jawa, Sunda, Melayu, Batak, dan Bugis yang memang didukung oleh berjuta-juta penutur dan bertradisi tulis asli, aksara Arab, Jawi, dan Latin.

Penyusutan bahasa daerah adalah sebagai tanda kerapuhan suatu bahasa. Sejumlah bahasa daerah di Provinsi Papua, NTT, NTB, Maluku Tenggara misalnya,

hanya didukung oleh beberapa ribu atau ratus penutur, bahkan di antaranya hanya didukung oleh beberapa penutur. Jumlah penutur muda pendukung bahasa-bahasa daerah itu semakin menyusut karena arus transimigrasi, urbanisasi, dan mobilitas sosial lintas etnik dan daerah yang semakin kuat gejalanya. Berdasarkan hasil penelitian Bagus dkk (1998), Gunarwan (2002), Mbete (2002) menyatakan bahwa ranah keluarga sebagai benteng terakhir, khususnya di kota dan desa-desa yang sudah tergolong maju, bahasa daerah tidak mendapat posisi dan fungsi penting lagi karena sudah diambil alih oleh bahasa Indonesia. Banyak ahli waris muda usia yang sudah malu, tidak percaya, dan tidak mampu menggunakan bahasa daerah. Jumlah ahli budaya dan bahasa daerah yang mencintai dan mengembangkan bahasa, sastra, dan budaya daerahnya semakin kecil.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, dan jika dikaitkan dengan tahapan ancaman kematian menurut (lihat, Fishman 1991: 88-109 & Reyhner, 1999) bahwa sejumlah bahasa daerah memang sudah berada pada taraf delapan, yakni taraf yang rapuh dan mencemaskan. Di antara bahasa-bahasa daerah di Indonesia memang ada yang hanya menyisakan segelintir penutur tua dan secara lingual tidak interaktif lagi antargenerasi. Banyak generasi muda berpendidikan tinggi dan tingkat mobilitasnya pun tinggi tidak mampu lagi berbicara dan berdialog dalam bahasa daerah dengan generasi tua dalam ranah adapt dan budaya lokal.

Kenyataan juga menunjukkan bahwa telah terjadi kesenjangan lingual dan cultural kedaerahan antargenerasi. Penguasaan dan penggunaan ragam halus, ragam baku, dan beku yang estetik dan kaya makna budaya pada sejumlah bahasa daerah yang tergolong besar, apalagi bahasa daerah kecil, terbatas pada generasi tua dengan jumlah yang kian mengecil pula.

Daya dukung penutur muda bahasa-bahasa daerah kecil dan besar, walaupun harus didata lebih diteil, diduga kuat semakin berkurang. Peminggiran bahasa daerah karena posisinya yang subordinat yang memang harus berlokasi dalam koridor kebahasaan bahasa Indonesia dan bahasa asing menggejala kuat. Meskipun diakui pula bahwa di sisi lain, tingkat mutu pemakaian bahasa Indonesia pun masih rendah, namun, rendahnya mutu dan lemahnya daya baca masyarakat Indonesia yang lebih tergiur pada media televise dan VCD/DVD, juga menunjukkan rendahnya mutu manusia Indonesia. Kerapuhan lingual-kultural perlu disikapi, dikritisi, dan diwaspadai. Lebih daripada itu, upaya revitalisasi bahasa dan budaya daerah, seiring dengan peningkatan mutu penggunaan dan perluasan wilayah pakai bahasa Indonesia, serta tuntutan penguasaan bahasa asing pada era global ini menjadi tugas yang sangat mendesak untuk diemban.

PEMBERDAYAAN DAN PEMEKARAN FUNGSI BAHASA DAERAH VS BAHASA ASING

Pemberdayaan dan pemekaran fungsi sebagai upaya revitalisasi bahasa-bahasa daerah harus diupayakan dalam kerangka kebahasaan nasional dan mondial. Secara nasional bahasa Indonesia harus tetap menempati posisi tertinggi dan superordianat dalam skala nilai kebahasaan dan kebudayaan, sedangkan bahasa daerah tetap menjadi penopang kehidupan bahasa nasional. Akan tetapi, dinamika dan kemajuan

bahasa Indonesia dituntut pula untuk turut mendorong kehidupan bahasa daerah. Sementara itu, sumber daya bahasa Inggris sebagai bahasa asing utama perlu dikuasai, disusul sejumlah bahasa asing lainnya, sesuai dengan dinamika dan kekuatan arus budaya global.

Pemekaran fungsi bahasa daerah melalui ranah adapt-budaya dan ranah agama mempunyai fungsi ganda. Selain pemekaran fungsi bahasa daerah, penggalian dan pemanfaatan kembali nilai-nilai budaya local yang relevan, dan juga pemberdayaan kembali lembaga-lembaga tradisional yang kurang, bahkan tidak berfungsi selama ini merupakan fungsi lainnya yang dapat diwujudkan. Sehubungan dengan ikhtiar itu, kegiatan kebahasaan di masyarakat yang dipadukan secara sinergis dengan kegiatan susastra dan budaya yang bertema local, nasional, dan mondial dengan menggunakan bahasa daerah setempat, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris layak dikelola secara sistematis dan berkesinambungan.

Agama, melalui peranan para pemimpin, lembaga, dan umatnya dapat berperan nyata memekarkan fungsi bahasa daerah dalam sebagian kegiatan keagamaan. Penggunaan bahasa daerah di kalangan pemimpin agama dan kegiatan keagamaan, misalnya ceramah agama, katekese, dan dharma wacana memang menuntut kecintaan dan pengorbanan untuk mempelajari kembali bahasa daerah di lingkungan keagamaannya dan mempraktikkannya dalam diskursus social-religius, dalam wejangan-wejangan, khotbah-khotbah, dan doa-doa mereka. Upaya ini sekaligus juga lebih mendekatkan dan lebih memberakarkan agama di tengah khazanah bahasa dan budaya Nusantara yang majemuk.

Visi kedwibahasaan yang berimbang dengan lebih dominannya fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa Negara, dan bahasa modern merupakan paradigma alternative terbaik. Kedwibahasaan dalam arti menguasai dan menggunakan dua bahasa atau lebih (lihat, Mackey, 1961, Romaine, 1997, McKay & Hornberger, 1996), bagi masyarakat Indonesia pada era global ini seharusnya merupakan kemajuan dan kebijakan politik yang berpijak pada hak kultural, hak lingual, dan menjadi bagian dari HAM. Sesuai dengan konvensi, dinyatakan bahwa jika selain bahasa Indonesia, berdasarkan kedudukan dan fungsinya yang mengatasi bahasa-bahasa Nusantara dan bahasa asing lainnya di negeri ini, maka bahasa-bahasa daerah patut dicintai lagi, dipelajari, dikuasai, dipercayai, dan digunakan kembali sebagai sarana primordial, perekat etnik, sumber daya budaya, dan wahana budaya nasional yang ada di pelbagai daerah.

Jebolnya fungsi bahasa daerah pada ranah keluarga sebagai benteng pertahanan terakhir bahasa daerah seharusnya belum menjadi kiamat bagi bahasa – bahasa daerah untuk bernafas kembali. Seiring dengan adanya gejala masyarakat Indonesia dan Negara-negara berkembang yang mulai menyadari kembali makna warisan masa lalu dalam semangat nasionalisme (lihat, Naisbitt & Aburdene, 1990: 126) dan terkait pula dengan otonomi daerah, peluang pemberdayaan bahasa daerah masih terbuka. Di sisi ranah keluarga juga diupayakan perevitalisasiannya secara fungsional dalam dua ranah kehidupan bahasa daerah, yakni, 1 ranah adapt dan budaya lokal, dan 2 ranah agama untuk memberdayakan kembali bahasa daerah sesuai dengan kedudukan dan fungsinya.

PENUTUP

Masyarakat ujar pemilik bahasa daerah dan pemerintah, khususnya Pusat Bahasa dan Balai Bahasa seharusnya memelihara, melindungi dan memberdayakan bahasa daerah sebagai ciri jati diri dan sarana komunikasi utama di lingkup lokalnya oleh sebagian para ahli warisnya. Konsep ini merupakan tuntutan moral dan budaya pada era global dengan tetap memperhatikan ketimpangan nasional dan lokal. Globalisasi dan modernisasi kebahasaan diharapkan tetap berakar nasional dan realitas lokal.

Kendala-kendala yang harus dicermati adalah masalah pembagian ranah-ranah pakai di antara bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. Hal ini sangat penting dilakukan agar bahasa Indonesia sebagai bahasa besar dan modern dan bahasa Inggris sebagai bahasa dunia tidak harus mencaplok dan menggusur bahasa-bahasa daerah.

Selanjutnya, keanekaragaman potensi bahasa dan budaya daerah dalam banyak aspeknya dapat dijadikan bahan dan ajang pemfungsian kembali dan pemberdayaan bahasa daerah. Banyak potensi sastra-budaya daerah yang nyaris tenggelam dan asing bagi generasi muda. Upacara tradisional dalam siklus hidup manusia dan pertanian yang unik, yang menjadi saran penyatu kelompok dan ramah lingkungan masih cukup potensial. Legenda, mite, dongeng, fable, dan puisi-puisi asli yang potensial dari pelbagai etnik mulai menghilang dari kehidupan modern. Muatan lokal dalam kurikulum yang berorientasi formal, yang secara konsepsional baik, perlu diubah dengan lebih mendalami dan memanfaatkan aneka potensi budaya daerah.

Pendidikan dan pengajaran bahasa, sastra, dan budaya daerah, serata Indonesia, dan asing secara sinergis sesungguhnya dapat dibangun bersama oleh lembaga pendidikan formal, lembaga adat dan budaya, dan pemerintah setempat dalam kegiatan-kegiatan yang lebu kongkrit, seperti lomba bercerita/mendongeng. Upaya pemberdayaan bahasa daerah dalam bentuk mendongeng atau bercerita berfungsi untuk membangun kembali tradisi lisan yang digusur oleh media elektronik dan merangsang tumbuhnya budaya baca-tulis.

Di tengah kondisi masyarakat yang tradisional, di tengah kedwibahasaan yang belum stabil, dan di tengah menguatnya gejala ketercabutan akar local, pemekaran fungsi bahasa daerah melalui dua ranah, yakni, adapt-budaya dan ranah agama dapat dipertimbangkan sebagai strategi pemberdayaan bahasa-bahasa daerah. Untuk memfungsikan kembali bahasa daerah melalui ranah adap, budaya, dan agama itu, pembakuan bahasa, termasuk tata tulisnya, dan penggalian potensi sastra dan tradisi lisan daerah harus mendahului pemberdayaan bahasa daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hasan, 2002, *Imbasan*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Bagus, I Gusti Ngurah, I Wayan Bawa, Arom Meko Mbete, Ni Luh Sutjiati, 1998, *Kedwibahasaan di Bali dan Nusa Tenggara*. Denpasar: Laporan Penelitian dengan biaya URGE Batch IV.
- Bright, Williams, 1971, *Sociolinguistics*. New York: Blackwell.
- Eastman, Carol M, 1983, *Language Planning, an Introduction*. San Fransisco: Chandler & Sharp Publishers Inc.
- Fairclough, Norma, 1995, *Discourse and Social Change*. Cambridge: Blackwell Pub.
- Ferguson, Charles, 1971, *National Linguistics Profile Formula* dalam Willian Bright (Ed.) *Sociolinguistics*. New York: Mouton & Co.
- Fishman, J.A. 1991. *Reversing Language Shift: Theoretical and Emperical Foundation of Assistance on Threatened Languages*. Clevedon UK: Multilingual Matters.
- _____, Charles Ferguson, Jyotrindra Das Gupta (Eds), 1973. *Language Problems of Developing Nations*. New York: John Wiley & Sons Inc.
- Mbete, Aron Meko, 1994. *Fungsi Bahasa Lio, Ngada, dan Sikka, Flores*. Laporan Penelitian dengan biaya The Toyota Foundation.
- _____, 2000. *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Daerah: Mencermati Konstitusi, Kenyataan, dan Tuntutan Perubahan*. Jurnal Linguistik Verba Volume 2. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Moelono, Anton M. 1981. *Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Ancangan Alternatif di dalam Perencanaan Bahasa*. Jakarta: Djambatan.
- Naisbit, John, 1971. *Kisah daripada Bahasa*. Terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: Bhratara.
- Rosidi, Ajip, 1999. *Bahasa Nusantara: Sebuah Pemetaan Awal. Gambaran tentang Bahasa-Bahasa Daerah di Nusantara*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Sekilas tentang penulis** : Mara Untung Ritonga, M.Hum. adalah Dosen Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia FBS Unimed.